

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Program Kampung Pancasila di RW IV Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan menggunakan kerangka teori Emerson et al. (2012), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Komponen *Collaborative Dynamics* menunjukkan bahwa ketiga dimensinya *Principled Engagement*, *Shared Motivation*, dan *Capacity for Joint Action* terbukti berjalan secara aktif dan saling menguatkan. Keterlibatan para aktor berlangsung secara multilevel dan inklusif mulai dari identifikasi kebutuhan yang berlapis (*Discovery*), penetapan tujuan empat pilar (*Definition*), musyawarah melalui forum formal dan komunikasi digital (*Deliberation*), hingga keputusan konkret berupa Dana Sosial Kampung Madani bersaldo hampir Rp100 juta (*Determination*). Motivasi bersama ditopang oleh transparansi keuangan, kebijakan subsidi silang, legitimasi berlapis, serta komitmen dari tiga motif berbeda. Kapasitas tindakan bersama terbangun melalui landasan hukum yang jelas, kepemimpinan fasilitatif Ibu Endang Purwaningtyas, transfer pengetahuan antarwarga, dan kemandirian sumber daya. Adapun elemen *Procedural and Institutional Arrangements* dan *Resources* masih memerlukan perbaikan akibat kendala teknis Aplikasi Sayang Warga dan ketimpangan distribusi beban kerja antarkader.
2. Komponen *Collaborative Actions* menunjukkan bahwa keempat mekanismenya *Deliberate Intervention*, *Sequencing*, *Regime Management*, dan

Generating Collaborative Capacity terbukti berjalan secara terencana dan bersifat *bottom-up*, di mana inisiatif berasal dari warga sementara pemerintah berperan sebagai pelegitimasi. Kolaborasi ini berhasil menghasilkan kapasitas-kapasitas baru bagi komunitas, meliputi kemandirian finansial, ekologis, transfer pengetahuan, dan tata kelola digital yang berkembang secara organik.

3. Komponen ***Impact and Adaptation*** menunjukkan bahwa program ini menghasilkan dampak nyata dan terukur pada keempat pilar kehidupan warga, mulai dari 452 rumah aktif memilah sampah, sistem keamanan SISKAMDU 24 jam, terkumpulnya Dana Madani Rp90.331.000, 14 warga penerima bantuan konkret melalui berbagai OPD, hingga 17 warga penerima sembako dari donatur komunitas. Program ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi secara teknologi, sosial, kelembagaan, maupun transformasi mentalitas warga dari pola pikir bergantung menuju mandiri.

Secara keseluruhan, implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Kampung Pancasila di RW IV telah berjalan dengan baik dan berhasil, dengan karakteristik *bottom-up*, *community-driven*, *multi-source*, dan *self-sustaining*. Sebelas dari dua belas elemen menunjukkan capaian positif. Keberhasilan RW IV ditetapkan sebagai satu-satunya prototype Kampung Pancasila Kota Surabaya menjadi bukti nyata efektivitas kolaborasi yang dibangun secara organik antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan komunitas warga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan lapangan, peneliti mengajukan saran konstruktif bagi empat pihak pemangku kepentingan.

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya. Merujuk pada temuan bahwa elemen *Procedural and Institutional Arrangements* dalam dimensi *Capacity for Joint Action* masih berada pada kategori Kurang Baik khususnya akibat kendala teknis Aplikasi Sayang Warga (ASW) yang kerap tidak stabil pada akhir bulan serta antarmuka yang belum ramah bagi kader senior berusia 60 tahun ke atas, Pemerintah Kota Surabaya perlu segera melakukan perbaikan teknis pada aplikasi tersebut. Selain itu, pemerintah kota disarankan untuk mempertimbangkan penyediaan anggaran stimulan dalam bentuk dukungan teknis dan fasilitasi akses pembiayaan, bukan subsidi langsung yang berisiko menciptakan ketergantungan.
2. Bagi Kelurahan Ngagel Rejo. Beban koordinasi program yang selama ini masih terpusat pada Ketua RW, serta belum tersedianya dokumentasi sistematis atas praktik baik yang telah dikembangkan, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas di tingkat RT. Oleh karena itu, Kelurahan perlu meningkatkan kapasitas manajerial para Ketua RT di lingkup RW IV agar beban koordinasi tidak hanya terpusat pada Ketua RW. Kelurahan bersama Kecamatan Wonokromo juga disarankan untuk mendokumentasikan secara sistematis seluruh praktik baik yang telah dikembangkan di RW IV, termasuk mekanisme rujukan multi-OPD, sebagai modul pembelajaran yang dapat direplikasi ke wilayah lain.

3. Bagi Pengurus RW IV Kelurahan Ngagel Rejo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program saat ini masih sangat bertumpu pada kepemimpinan personal Ibu Endang Purwaningtyas, sehingga menimbulkan risiko keberlanjutan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan pada masa mendatang. Atas dasar tersebut, Pengurus RW IV perlu segera menginisiasi program *regenerasi* kader secara terencana dengan menarik partisipasi warga usia produktif dari unsur Karang Taruna. Diperlukan kaderisasi kepemimpinan yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan program pasca masa kepemimpinan beliau.
4. Bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif pada satu titik waktu (*cross-sectional*) dan berfokus pada satu RW sebagai studi kasus tunggal, sehingga belum dapat menangkap dinamika keberlanjutan program dalam jangka panjang maupun variasi keberhasilan replikasi di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sustainabilitas *Collaborative Governance* di RW IV pasca pergantian kepemimpinan Ketua RW, serta melakukan studi komparatif antara RW IV Ngagel Rejo dengan RW lain yang menjadi sasaran replikasi Program Kampung Pancasila, guna mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang menentukan keberhasilan atau kegagalan replikasi model kolaborasi serupa.